BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan International

Istilah Hubungan Internasional secara umum dapat didefinisikan bahwa hubungan internasional itu mengacu terhadap hubungan yang terjadi antar pemerintah di dunia yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaitan erat dengan aktor-aktor lain seperti Organisasi Internasional, korporasi internasional dan individu-individu dengan struktur sosial yang lain mencakup ekonomi, kebudayaan dan politik domestik serta pengaruh-pengaruh geografis maupun historisnya (Goldstein, 1999: 3).

Hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, *nation-state*, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas. Menurut Rosenau, terdapat lima aktor hubungan internasional, yaitu:

1. Individu-individu tertentu
2. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta
3. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahannya
4. Organisasi internasional
5 Seluruh wilayah geografis dan pengelompokkan-pengelompokkan politik utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 1976: 5).

Kajian hubungan internasional sangat luas meliputi seluruh jenis hubungan atau interaksi antar negara termasuk asosiasi dan organisasi non negara serta jalinan hubungan yang bersifat politik maupun non politik (Johari, 1985: 9).

Luasnya cakupan studi hubungan internasional menyebabkan hubungan internasional sebagai studi yang berdiri sendiri membutuhkan pendekatan yang bersifat interdisipliner. Menurut Columbis dan Wolfe, studi hubungan internasional mencakup kajian ilmu politik, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi, serta ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, *cybernetic* (Columbis dan Wolfe, 1999: 21).

Dinamika hubungan internasional pada satu dasawarsa terakhir menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Berakhirnya Perang Dingin telah merubah tatanan sistem internasional dari *bipolar* menuju pada *multipolar*. Perubahan tersebut telah membawa pola hubungan menuju arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia ini. Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (seperti hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme). Oleh karena itu, tidak mengherankan bila fenomena-fenomena hubungan internasional kini telah memasuki dimensi baru yang perlu ditangani dengan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai dan akurat sehingga mengakibatkan munculnya beragam definisi mengenai hubungan internasional dari para ahli hubungan internasional.

Pada awal perkembangannya, Shcwarzenberger mengatakan bahwa ilmu hubungan internasional adalah:

> "Bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga) atau pertukaran budaya (*cultural exchange*)" (Shcwarzenberger, 1964: 8).

Sementara itu, terdapat sarjana hubungan internasional yaitu menurut Hoffman yang justru memperkecil ruang lingkup ilmu hubungan internasional, yaitu:

> "Ilmu hubungan internasional merupakan subjek akademis dalam memperhatikan hubungan politik antar negara, dimana selain negara ada juga pelaku internasional, transnasional atau supranasional lainnya seperti organisasi nasional" (Hoffman, 1960: 6).

Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, jugs meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia. Hubungan internasional berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi dan interaksi lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non- negara. Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.

Mc Clelland mendefinisikan "Hubungan Internasional" sebagai:

> "suatu studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mc Clelland, 1990: 30).

Sedangkan menurut Holsti "Hubungan Internasional" ialah:

> "Hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional dapat mencakup analisa kebijakan luar negeri, perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi, turisme dan perkembangan etika internasional (Holsti, 1988 : 29).

Hubungan internasional pada saat sekarang ini semakin kompleks keberadaannya dimana interaksi tidak hanya terjadi antar negara saja melainkan juga aktor-aktor lain di luar negara (seperti organisasi internasional, *Multi National Corporation's*, kelompok teroris dan organisasi lingkungan yang semuanya merupakan bagian dari politik dunia) yang juga mempunyai peranan penting dan berpengaruh dalam hubungan internasional.

Dalam studi hubungan internasional terdapat berbagai pemikiran diantaranya yaitu liberalisme. Liberalisme adalah pemikiran politik, ekonomi, teori sosial dan filosofi yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia dan meyakini kebebasan individu dan peningkatan kehidupan manusia. Secara politik, liberalisme diterjemahkan sebagai keterbatasan peran pemerintah (Steans, 2001: 48).

Dalam liberalisme muncul istilah pluralisme yang mengacu kepada keyakinan bahwa diperlukan distribusi kekuasaan politik pada beberapa lembaga. Liberal berpendapat bahwa negara berdaulat merupakan aktor yang penting tetapi bukan satu-satunya aktor signifikan dalam hubungan internasional. Liberal kontemporer berpendapat bahwa negara dapat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada lembaga lain misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau

Uni Eropa. Selanjutnya aktor hubungan internasional seperti MNC's yakni perusahaan asing dari suatu negara yang memiliki anak-anak perusahaan di negara lain, lembaga internasional maupun regional juga dapat dikatakan berpengaruh (*influental*) (Steans, 2001: 57-59).

Pluralisme mengandung serangkaian asumsi yang berbeda, diantaranya, *non-state actor* adalah kesatuan penting dalam hubungan internasional yang tidak dapat dihindarkan. Organisasi internasional misalnya, dapat menjadi aktor dengan hak yang dimilikinya. Organisasi internasional merupakan suatu arena dimana di dalamnya terdapat negara-negara berdaulat yang bersaing. Aktor *non-governmental* lainnya seperti organisasi lingkungan dan MNC's juga memegang peranan yang penting dimana dapat berhubungan dengan peningkatan interdependensi dalam ekonomi dunia. Bagi pluralisme negara bukanlah aktor utama dan menolak dugaan bahwa politik internasional didominasi oleh isu keamanan dan militer. Agenda hubungan luar negeri telah meluas ke isu-isu lain seperti ekonomi dan sosial (Heywood, 2001: 4).

2.2 Paradigma Pluralis

Paradigma bisa diartikan sebagai aliran pemikiran yang memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk metodelogis dan teknik analisis. Selain itu, paradigma juga berfungsi untuk menentukan batas-batas ruang lingkup suatu disiplin atau kegiatan keilmuan dan menetapkan ukuran untuk menilai keberhasilan disiplin tersebut (Mas'oed, 1990:8).

Pluralis merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi Paradigma Pluralis, yaitu:

1. Aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat diabaikan, contohnya Organisasi Internasional baik yang pemerintahan maupun non-pemerintahan, aktor transnasional, kelompok-kelompok bahkan individu.
2. Negara bukanlah aktor Unitarian, melainkan ada aktor-aktor lainnya yaitu individu-individu, kelompok kepentingan dan para birokrat. Dalam hal ini dalam pengambilan keputusan atau kebijakan suatu negara, tidak semata-mata absolut berdasarkan kepentingan negara tersebut, namun juga dalam pembuatan kebijakan atau keputusan dapat juga dipengaruhi oleh individu-indivu, kelompok kepentingan dan para birokrat. Hal tersebut terjadi karena suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara mewakili masyarakatnya.
3. Menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, dimana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, akan tetapi demi kepentingan-kepentingan tertentu.
4. Agenda dalam Politik Internasional adalah luas, pluralis menolak bahwa ide Politik Internasional sering didominasi dengan masalah

militer. Agenda Politik Luar Negeri saat ini sudah berkembang dan militer bukanlah satu-satunya hal yang paling utama, tetapi ada hal-hal utama lain didalam Hubungan Internasional seperti ekonomi dan sosial. Contoh perhatian dari pluralis adalah dalam bidang perdagangan, keuangan, dan isu energi sehingga bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian utama dalam agenda politik internasional. Hal lain yang mempengaruhi dunia internasional menurut kaum pluralis adalah bagaimana mengatasi permasalahan populasi dunia di bagian negara-negara dunia ketiga. Masalah populasi tersebut dapat mempengaruhi keberadaan sumber daya alam yang berkaitan dengan isu ketahanan nasional suatu negara. (Viotti dan Kauppi, 1990:215).

2.3 Kerjasama International

Konsep mengenai kerjasama disampaikan oleh Cooley, dimana kerjasama tersebut terjadi dan timbul apabila:

> "Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna" (Cooley, 1930:176).

Sedangkan kerjasama menurut Douherty dan Graff, dapat diartikan sebagai:

> "Perangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Kerjasama dapat muncul akibat adanya komitmen individu dan negara untuk mendapatkan kesejahteraan kolektif"(Douherty & Graff, 1997:418).

Namun demikian kesejahteraan kolektif tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan kerjasama kolektif antara individu dan negara saja namun diperlukan kerjasama yang lebih luas seperti kerjasama internasional.

Kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun:

> "Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral (Coplin & Marbun, 2003:282).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri.

Isu utama dari kerjasama internasional menurut Douherty dan Graff, yaitu:

> "Berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentinagn tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Berbagai masalah tersebut telah membawa negara-negara di dunia untuk membentuk suatu kerjasama internasional" (Douherty & Graff, 1997:419).

Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam "Organisasi dan Administrasi Internasional", menjelaskan pengertian kerjasama internasional yang dapat dipahami sebagai:

> "kerjasama dalam masyarakat internasional suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat ionternasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* serta mempunyai arah

> tujuan sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (Kartasasmita, 1997: 20)"

Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu. Tujuan dari kerjasama internasional dikonsepsikan secara jelas oleh Plano dan Olton, yaitu:

> "Untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai. Kerjasama itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi internasional. . Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya" (Plano dan Olton, 1979:271).

2.4 Organisasi Internasional

Sebagai bentuk dari kerjasama internasional dalam wujud organisasi internasional telah banyak dilakukan untuk berbagai macam kepentingan dalam berbagai macam kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan. Disamping itu, pengertian tentang organisasi tidak hanya menyangkut kepada segi strukturnya saja, akan tetapi juga pada segi fungsinya. Berdasarkan kepada hal tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa oerganisasi internasional itu tumbuh dari kehidupan sosial manusia didalam masyarakat internasional.

Selain itu, organisasi internasional juga merupakan suatu proses yang sangat dinamis terhadap perkembangan hubungan antar negara atau bangsa dan refleksi kehidupan sosial manusia yang meliputi berbagai bidang yang telah menjadi perhatian dari disiplin-disiplin ilmu lainnya.

Secara umum organisasi internasional itu adalah suatu organisasi yang ada di lingkungan masyarakat internasional. Organisasi internasional terbentuk karena adanya suatu kepentingan yang sama dari berbagai negara atau bangsa, maka organisasi internasuinal itu merupakan salah satu wujud dari kerjasama internasional, hal ini didahului oleh adanya kepentingan-kepentingan yang sama yang dilahirkan oleh adanya hubungan yang menjadi pokok dari terbentuknya organisasi internasional, sehingga negara-negara yang membentuk organisasi internasional, sehingga negara-negara yang membentuk organisasi internasional dapat merasakan bahwa tujuan-tujuan nasional dengan segala permasalahan didunia yang sangat kompleks, baik itu masalah-masalah ekonomi, budaya, sosial maupun masalah politik dan lain-lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Wayan Parthiana dalam bukunya "Organisasi Internasional", yang mendefinisikan mengenai organisasi internasional sebagai berikut :

> "Suatu organisasi atau perkumpulan yang didirikan oleh atau yang anggota-anggotanya terdiri dari negara-negara atau badan-badan non pemerintahan yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan". (1987:1)

Jadi jelaslah bahwa organisasi internasional sebenarnya didirikan bukan hanya untuk sekedar mencapai suatu tujuan pada masing-masing pihak saja, tetapi selain daripada itu para anggotanya bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama, sehingga negara-negara yang membentuk organisasi internasional merasakan bahwa tujuan nasional mereka dapat tercapai. IFAD juga bertujuan dalam setiap program-programnya agar pada tahun 2015 masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang dapat keluar dari masalah kemiskinan.

Adapun definisi dari organisasi internasional menurut Jack.L.Plano dan Roy Olton yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda dalam bukunya "Kamus Hubungan Internasional", adalah sebagai berikut :

> "Organisasi internasional merupakan suatu struktur atau lembaga yang resmi melintasi batas negara yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menunjukan kerjasama diantara negara-negara dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, atau lainnya yang berhubungan". (1987:52)

Istilah organisasi internasional lebih banyak digunakan dari pada World Organization karena itu definisi yang dikemukakan Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya "Organisasi Internasional", berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut :

> "Organisasi Internasional mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya meliputi kegiatan negara dalam masyarakat dunia, disamping itu, pengertian organisasi internasional tidak hanya menyangkut kepada segi strukturnya saja akan tetapi pada fungsinya. Dalam arti statis, organisasi internasional merupakan wadah dari kegiatan Administrasi Internasional yang meliputi berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat internasional tidak terdapat organisasi tertinggi seperti halnya sebagai organisasi masyarakat dalam masyarakat internasional". (1998:20)

Selanjutnya Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya "Administrasi Internasional", mengemukakan bahwa berdasrkan pada sifatnya maka organisasi internasional mempunyai sifat rangkap adapun sikap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebagai suatu alat dari masing-masing negara yang berdaulat untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam masyarakat internasional. Kondisi ini menunjukan system yang dianut adalah system banyak negara *(multi state system*)

2. Sebagai proses adalah suatu proses kearah terbentuknya suatu *World Government* dan terdapat suatu proses untuk mengubah *national state system* yang berlaku dan menggantikan system yang baru (1988:46).

Selanjutnya Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya "Administrasi Internasional" mengemukakan bahwa organisasi internasional dalam arti luas mempunyai dua macam arti, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi Internasional Publik, merupakan organisasi antar negara yang tumbuh didasarkan pada perjanjian multilateral dengan persyaratan dan tujuan tertentu, organisasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan negara dalam masyarakat internasional, bertambah banyaknya organisasi internasional public ini disebabkan bertambah menigkatnya interdependensi dalam masyarakat internasional.
2. Organisasi Internasional Privat, merupakan organisasi yang tidak terbentuk oleh pemerintahan atau negara dan keanggotaanya terbuka untuk individu-individu dan golongan yang mempunyai kepentingan internasional. (1998:50)

Organisasi internasional mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya meliputi kegiatan negara-negara dalam suatu kawasan tertentu saja, melainkan juga meliputi semua kegiatan antar negara dalam masyarakat internasional yang menyangkut segi *structural* dan fungsinya. Terdapat dua factor pendorong bagi berdirinya suatu organisasi internasional, yang antara lain :

1. Obyektif, meliputi :
    a. Kenyataan dari banyak negara atau bangsa.
    b. Ada hubungan antar negara atau bangsa.
2. Subyektif, meliputi :
    a. Adanya masalah antar negara atau bangsa.
    b. Adanya kebutuhan atau upaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka organisasi internasional dapatlah dikatakan tumbuh, karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa dan negara untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasi kerjasama antar negara atau bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan perlu diusahakan secara bersama-sama, salah satunya adalah melalui organisasi internasional.

2.4.1 *Inter-Governmental Organization* (IGO)

Konsep dan praktek dasar yang melandasi IGO moderen melibatkan diplomasi, perjanjian, konferensi, aturan-aturan dan hukum perang, pengaturan penggunaan kekuatan, penyelesaian sengketa secara damai, pembangunan hukum internasional, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama sosial internasional, hubungan budaya, perjalanan lintas negara, komunikasi global, gerakan perdamaian, pembentukan federasi dan liga, administrasi internasional, keamanan kolektif, dan gerakan pemerintahan dunia (Bennet, 1995: 9).

IGO dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum

   Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.

2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas

   Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), *International Fund For Agricultural Development* (IFAD) dan lain sebagainya.

3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum

   Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosial-ekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.

4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas

   Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa (Columbis & Wolfe, 1999: 281).

2.4.2 Peranan Organisasi Internasional

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang atau suatu kelompok melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Peran menurut Perwita dan Yani adalah "Seperangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental" (Perwita dan Yani, 2005:29).

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Peranan (*role*) dapat di artikan sebagai "Perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status" (Horton & L. Hunt, 1987:132). Peranan juga dapat dilihat sebagai:

> "Tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*)" (Perwita & Yani, 2005:30)

Selain konsep diatas, peranan juga dikonsepsikan oleh K.J Holsti dalam "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis" yaitu:

> "Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variabel sistematik geografi dan ekonomi" (Holsti, 1992:159).

Namun dalam hal ini, Clive archer mendefinisikan peranan dalam konteks organisasi internasional yang dilihat dari bagaimana peranan organisasi internasional tersebut di dunia internasional, yang terdiri dari 3 poin penting, yaitu:

1. Instrumen (alat), organisasi internasional digunakan sebagi alat bagi anggotanya untuk mencapai kepentingannya
2. Arena (forum), organisasi internasional dalam hal ini menyediakan tempat untuk rapat, berkumpul, berdebat, kerjasama atau aling berbeda pendapat bagi anggotanya
3. Aktor, organisasi internasional adalah actor yang independent dimana ia mampu bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan luar dan mampu mempengaruhi arah-arah kejadian di dunia, selain itu dilihat dari adanya fakta bahwa manusia mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui organisasi bukan lagi melalui Negara bangsa (Archer, 1983:130-136).

2.5 Konsep Pendapatan

IFAD menilai bahwa penyebab kemiskinan bagi masyarakat pedesaan dikarenakan institusi-institusi di pedesaan kurang tanggap dalam menagani

permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat pedesaan, kemiskinan di pedesaan juga disebabkan oleh kurangnya akses bagi para petani dalam menyalurkan dan mendistribusikan hasil pertanian mereka ke pasar, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan pendapatan dari hasil taninya. Oleh karena itu IFAD dalam programnya selalu berusaha untuk membenahi prasarana-prasarana yang ada di pedesaan termasuk membenahi institusi-institusi pedesaan dan akses layanan pasar, sehingga masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Perbedaan antara masyarakat kota dan desa terlihat dari segi mata pencaharian. Masyarakat pedesaan berada di sektor ekonomi primer yaitu bidang agraris, kehidupan perekonomian masyarakat pedesaan tergantung pada usaha pengelolaan tanah untuk keperluan pertanian. Sedangkan masyarakat kota berada di sektor ekonomi sekunder yang meliputi bidang industri. Kegiatan di desa ialah mengolah lahan untuk memperoleh bahan-bahan mentah baik pangan maupun sandang untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Sedangkan Kegiatan di kota ialah mengolah bahan-bahan mentah yang berasal dari desa menjadi bahan-bahan setengah jadi sehingga berwujud bahan jadi dan bisa dikonsumsikan.

Pendapatan merupakan perolehan barang atau uang yang diterima atau dihasilkan. Seperti pada masyarakat petani bahwa besar kecilnya pendapatan petani dari usaha taninya terutama ditentukan oleh luas lahan garapan, selain itu factor lain juga turut menentukan antara lain produktifitas dan kesuburan tanah, jenis komoditi yang diusahakan serta tingkat penerapan teknologi pertanaian

Menurut Rachman dan Hadimuslihat pendapatan ialah keragaman sumberdaya mempengaruhi struktur pendapatan rumah tangga pedesaan. Sumber pendapatan rumah tangga di suatu lokasi erat kaitannya. (Rachman & Hadimuslihat, 1989:2)

Sedangkan menurut Adnyana et, al. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu:

> "sektor pertanian dan non-pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usahatani/ternak dan berburuh tani. Sedangkan dari sektor nonpertanian berasal dari usaha nonpertanian, profesional, buruh nonpertanian dan pekerjaan lainnya di sektor nonpertanian. (http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(13)%20soca-supadi-rozanypengel%20rt(1).pdf, [diakses 20 April 2009])

Sebagian besar penduduk pedesaan di Sulawesi tengah bermata pencaharian sebagai petani, hal ini disebabkan oleh keadaan alam di Sulawesi tengah serta tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat pedesaan di Sulawesi tengah, dalam hal ini IFAD memberikan bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan mata pencaharian, dengan cara memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pelatihan-pelatihan yang membuat masyarakat pedesaan tersebut mempunyai keterampilan yang lebih baik, selain memberdayakan masyarakat pedesaan, IFAD juga memberikan bantuan dalam programnya berupa pengembangan pertanian budidaya dan non-budidaya, pembangunan prasarana pertanian dan pengelolaan program dan analisis kebijakan yang semuanya itu merupakan langka-langkah dari IFAD guna meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga mereka.

Dengan demikian peranan IFAD memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam menangulangi kemiskinan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang saat ini sedang berjalan. Sebagai Organisasi Internasional, IFAD sangat aktif memberikan bantuan terhadap negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan yang ada khususnya mengenai pertanian dan peningkatan mata pencaharian masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang.

2.5.1 Peningkatan Pendapatan

Tujuan akhir program pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pendapatan tersebut kerap digunakan sebagai indikator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu komunitas. Namun, bila dilihat lebih jauh peningkatan pendapatan tersebut belum menjamin perbaikan kesejahteraan anggota masyarakat luas karena tingkat pendapatan yang bervariasi antar rumah tangga sesuai dengan tingkat penguasaan sumberdaya dan kemampuan mengelolanya. Dengan perkataan lain bahwa peningkatan pendapatan suatu komunitas tidak selalu diikuti perbaikan distribusi di antara anggotanya

Ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pendapatan tergantung pada tipe dan tingkat pembangunan ekonomi. Tingkat pendapatan yang meningkat dan distribusi yang membaik terjadi pada keadaan pembangunan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan sektor tradisional (*traditional sector enrichment*) dan memperlebar sektor modern (*modern sector enlargement*). Secara ringkas dapat

dikatakan bahwa distribusi pendapatan cenderung membaik pada kasus pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat peningkatan pendapatan secara signifikan pada sektor tradisonal (*traditonal sector enrichment*). Sebaliknya distribusi pendapatan semakin memburuk karena peningkatan pendapatan sektor modern (Field, 1979:2).

Tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan berkorelasi dengan tingkat pendapatan propinsi-propinsi di Indonesia. Walaupun relasinya lemah dan terletak pada batas tidak signifikan secara statistik, pola hubungannya menunjukkan bahwa propinsi-propinsi dengan tingkat pendapatan tinggi memiliki tingkat ketidakmerataan yang tinggi pula. (Islam Dan Khan, 1986:2)